

JURNAL KOMPILEK

Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi

Zubaidah Nasution/
Achmad Saiful Ulum

ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN SYARIAH PADA SEKTOR EKONOMI

Anis Wulandari/ Fariyana
Kusumawati/ Siti
Latifatul Kamalia

PENGARUH NET PROFIT MARGIN, RETURN ON ASSETS, RETURN ON EQUITY, EARNING PERSHARE, DEBT TO EQUITY RATIO, TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2009-2013

Retno Murni Sari

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA BENDOSARI KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN TULUNGAGUNG

Moch. Wahyu Widodo/
Ismayantika Dyah
Puspasari

PERBEDAAN LABA SEBELUM DAN SESUDAH PENAMBAHAN EXTRAORDINARY INCOME : ANALISIS PADA PERUSAHAAN LQ 45 TAHUN 2010-2011

Andy Kurniawan/
Suyanto

PERAN RASIO KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN RETURN ON ASSET PERUSAHAAN MANUFAKTUR PADA BURSA EFEK INDONESIA

Shara Merry Palupi/
Sandi Eka Suprajang

PENGARUH LINGKUNGAN, GAYA KEPEMIMPINAN DAN ROLE DEMANDS TERHADAP JOB STRESS PADA KARYAWAN PT GRIYA ASRI MANDIRI KOTA BLITAR

Noviana Anjarsari/
Siti Sunrowiyati

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PERSEDIAAN BAHAN BAKU DAN PENGARUHNYA TERHADAP LABA PADA PR ALAINA TULUNGAGUNG

Dea Clara Valentina/
Yudhanta
Sambharakreshna

DAMPAK PENGELOLAAN MODAL KERJA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN MENGGUNAKAN RETURN ON ASSET (STUDI KASUS PADA PDAM TIRTA PENATARAN KABUPATEN BLITAR)

Rony Ika Setiawan

PERSEPSI TENAGA KERJA LOKAL PADA INVASI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA: TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) TAHUN 2015

[Vol 7, No. 2]

Hal. 110 - 218

Desember 2015

Diterbitkan oleh:
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KESUMA NEGARA BLITAR
Jl. Mastrip 59 Blitar 66111, Telp./Fax : (0342) 802330/813779
Email : info@stieken.ac.id**

JURNAL KOMPILEK

Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi

**Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
STIE Kesuma Negara Blitar sebagai terbitan yang menyajikan informasi dan
analisa persoalan ilmu ekonomi, manajemen, maupun akuntansi.**

Pelindung

Iwan Setya Putra, SE., Ak., MM.

Pemimpin Redaksi

Aris Sunandes, SE., MM.

Sekretaris Redaksi

Vera Noviana, SE., Ak.

Pelaksana Redaksi

Siti Sunrowiyati, SE., MM.

Sandi Eka Suprajang, SE., MM.

Penyunting

Tanto Askriyandoko Putro, SE., MM.

Reviewers:

Prof. Dr. HM. Pudjihardjo, SE, MS – Universitas Brawijaya
Iwan Setya Putra, SE., Ak., MM – STIE Kesuma Negara
Yudhanta Sambharakreshna SE., MSi., Ak – Universitas Trunojoyo

Alamat Redaksi:

**Kampus STIE Kesuma Negara
Jl. Mastrip No. 59, Blitar, Jawa Timur – 66111**

Telepon/Fax:

(0342) 802330 / (0342) 813788

on-line:

<http://www.stieken.ac.id>

E-mail:

info@stieken.ac.id

JURNAL KOMPILEK

Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi

Daftar Isi :

- | | |
|--|---|
| <i>Zubaidah Nasution/
Achmad Saiful Ulum</i> | ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN SYARIAH PADA SEKTOR EKONOMI
(Hal. 110-122) |
| <i>Anis Wulandari/ Fariyana
Kusumawati/ Siti
Latifatul Kamalia</i> | PENGARUH <i>NET PROFIT MARGIN, RETURN ON ASSETS, RETURN ON EQUITY, EARNING PERSHARE, DEBT TO EQUITY RATIO</i>, TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2009-2013
(Hal. 123-138) |
| <i>Retno Murni Sari</i> | AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA BENDOSARI KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN TULUNGAGUNG
(Hal. 139-148) |
| <i>Moch. Wahyu Widodo/
Ismayantika Dyah
Puspasari</i> | PERBEDAAN LABA SEBELUM DAN SESUDAH PENAMBAHAN <i>EXTRAORDINARY INCOME</i> : ANALISIS PADA PERUSAHAAN LQ 45 TAHUN 2010-2011
(Hal. 149-155) |
| <i>Andy Kurniawan/
Suyanto</i> | PERAN RASIO KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN <i>RETURN ON ASSET</i> PERUSAHAAN MANUFAKTUR PADA BURSA EFEK INDONESIA
(Hal. 156-162) |
| <i>Shara Merry Palupi/
Sandi Eka Suprajang</i> | PENGARUH LINGKUNGAN, GAYA KEPEMIMPINAN DAN ROLE DEMANDS TERHADAP JOB STRESS PADA KARYAWAN PT GRIYA ASRI MANDIRI KOTA BLITAR
(Hal. 163-175) |
| <i>Noviana Anjarsari/
Siti Sunrowiyati</i> | ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PERSEDIAAN BAHAN BAKU DAN PENGARUHNYA TERHADAP LABA PADA PR ALAINA TULUNGAGUNG
(Hal. 176-188) |
| <i>Dea Clara Valentina/
Yudhanta
Sambharakreshna</i> | DAMPAK PENGELOLAAN MODAL KERJA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN MENGGUNAKAN <i>RETURN ON ASSET</i> (STUDI KASUS PADA PDAM TIRTA PENATARAN KABUPATEN BLITAR)
(Hal. 189-201) |
| <i>Rony Ika Setiawan</i> | PERSEPSI TENAGA KERJA LOKAL PADA INVASI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA: TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) TAHUN 2015
(Hal. 202-218) |

PERSEPSI TENAGA KERJA LOKAL PADA INVASI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA: TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) TAHUN 2015

Rony Ika Setiawan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara Blitar

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apakah pelaku MEA dalam hal ini tenaga kerja memahami implikasi pemberlakuan MEA. Dan meneliti bagaimana persepsi tenaga kerja lokal terhadap invasi/kedatangan tenaga kerja asing ke Indonesia secara masif. Hal ini dikarenakan bagi tenaga kerja Indonesia, pemberlakuan MEA menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana kesadaran tenaga kerja menghadapi MEA tentu menarik juga untuk dikaji sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana persepsi tenaga kerja lokal terhadap tenaga kerja asing dalam koridor implementasi MEA. Penelitian ini menggunakan model kuantitatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak tenaga kerja lokal yang tidak mengetahui pemberlakuan MEA. Tenaga kerja mengetahui implementasi MEA secara tidak merata, diduga akibat sosialisasi pemerintah yang kurang masif. Tenaga kerja memiliki persepsi bahwa mereka tidak lebih buruk dari tenaga kerja asing. Akan tetapi tenaga kerja lokal belum memiliki gambaran komprehensif dalam menilai kompetensi mereka dibanding dengan tenaga kerja asing. Hasil penelitian ini berimplikasi bahwa pengetahuan masyarakat akan implementasi MEA menunjukkan bahwa mereka sendirilah yang nantinya menghadapi peluang dan tantangan dari sektor lapangan pekerjaan/ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Lokal, Invasi Tenaga Kerja Asing, MEA

PENDAHULUAN

Globalisasi telah menjadi isu utama dari perkembangan dan kemajuan negara. Salah satu perkumpulan negara-negara yang diperhitungkan adalah ASEAN (*Association of South East Asian Nation*). Tujuan dibentuknya ASEAN sendiri tercantum dalam Deklarasi Bangkok yaitu untuk: (a) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan kawasan; (b) Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional; (c) Meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, iptek, dan administrasi; (d) Memelihara kerja sama erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional.

Salah satu isu yang sangat strategis untuk didiskusikan adalah terkait implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan diimplementasikan mulai tahun 2015. MEA pada dasarnya ialah upaya untuk membentuk pasar bebas antara negara-negara Asia Tenggara, misalnya bea masuk barang dan jasa akan dihapus. Ini akan berdampak

terhadap arus lalu lintas produk dari negara ASEAN, termasuk dalam hal ini ialah tenaga kerja. Pada era pasar bebas ASEAN 2015, semua negara ASEAN akan berkompetisi memperebutkan lapangan kerja yang ada. Negara dengan kompetensi SDM tinggi akan mendapat kesempatan lebih unggul mendapatkan keuntungan ekonomi dalam MEA.

Merujuk pada survei Forum Ekonomi Dunia (WEF) tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat ke-50 dari 144 negara yang disurvei. Tahun ini Indonesia mengalami penurunan indeks daya saing global, dari posisi ke 46 (2011) menjadi ke 50 (2012). Peringkat terbaik Indonesia adalah pada tahun 2010 (ke 44), yang meloncat dari posisi ke 54 dari tahun sebelumnya. Jika diranking pada level ASEAN, Indonesia berada pada peringkat kelima. Indonesia masih kalah dari Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand. Negara tetangga TimorLeste menempati urutan terakhir (ke 136) di ASEAN. Negara-negara ASEAN yang mengalami kenaikan indeks daya saing terbesar sejak 2008 adalah Kamboja (24 tingkat), Brunei Darussalam (11),

Filipina (6), Indonesia (5) dan Singapura (3). Sedangkan Malaysia, Thailand, Vietnam dan Timor Leste mengalami penurunan peringkat daya saing selama 2008-2012 (Bapenas, 2012).

Melihat data penurunan daya saing yang terus terjadi, menjadi suatu pertanyaan apakah Indonesia sudah siap atau tidak dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Khususnya menyangkut isu daya saing tenaga kerja Indonesia yang masih rendah produktivitasnya dan masih kerap munculnya konflik upah. Data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia berada dalam kuadran kritis. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, jumlah pengangguran yang semakin besar. Kedua, keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia masih belum optimal. Hal ini semakin dilemahkan dengan belum maksimalnya pemerataan sertifikasi profesi tenaga kerja, khususnya pada sektor-sektor padat karya.

Kerjasama ekonomi antar negara-negara anggota ASEAN telah dimulai sejak disahkannya Deklarasi Bangkok tahun 1967. Tujuan kerjasama ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Dalam dinamika perkembangannya, kerjasama ekonomi ASEAN diarahkan pada pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC) yang pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik-keamanan dan sosial budaya.

Setelah krisis ekonomi yang melanda khususnya kawasan Asia Tenggara, para Kepala Negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-9 di Bali, Indonesia tahun 2003, menyepakati pembentukan komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) dalam bidang Keamanan Politik (*ASEAN Political-Security Community*), Ekonomi (*ASEAN Economic Community*), dan Sosial Budaya (*ASEAN Socio-Culture Community*), yang kemudian dikenal dengan Bali Concord II. Untuk pembentukan ASEAN Economic Community pada tahun 2015, ASEAN telah menyepakati akan diarahkan pada integrasi ekonomi kawasan yang

implementasinya mengacu pada cetak biru (*blueprint*) AEC. *AEC Blueprint* ini memuat empat pilar utama yaitu: (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negaranegara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global (ASEAN, 2007a dan ASEAN, 2013).

Dalam cetak biru tersebut juga ditetapkan bahwa ada 12 sektor prioritas yang akan diintegrasikan. Tujuh diantaranya adalah sektor barang, yaitu industri agro, perikanan, industri berbasis karet, industri tekstil dan produk tekstil, industri kayu dan produk kayu, peralatan elektronik, dan otomotif. Sementara sisanya adalah lima sektor jasa, yakni transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, serta industri teknologi informasi atau e-ASEAN. Dengan terintegrasinya sektor-sektor tersebut tentunya akan membawa implikasi terutama terhadap pergerakan barang dan jasa antar negara ASEAN yang semakin bebas. Di samping itu, integrasi tersebut juga diperkirakan akan mempengaruhi pergerakan faktor-faktor produksi, khususnya tenaga kerja antar sesama negara anggota.

Dalam kondisi demikian, masalah daya saing masing-masing negara menjadi salah satu besaran penting yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mengenai dampak MEA terhadap daya saing Indonesia secara umum dan masalah ketenagakerjaan.

Primasanto (2010) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Indonesia lebih banyak memberangkatkan/menyediakan tenaga kerja tidak terampil, sedangkan Filipina lebih banyak menyediakan tenaga kerja terampil untuk bekerja di luar negeri. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam meningkatkan daya saing di sektor tenaga kerja. Disisi lain, invasi tenaga kerja dari luar negeri yang masuk Indonesia angka nya mengalami peningkatan. Hal ini akan menjadi kekhawatiran dikalangan pekerja lokal pada umumnya.

Penelitian yang dilakukan Fernandes dan Andadari (2012) yang meneliti tentang persepsi tenaga kerja terhadap pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN. Penelitian ini mengindikasikan bahwa mayoritas tenaga kerja tidak memahami atau memiliki pengetahuan tentang masyarakat ekonomi asean. Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja kurang mempunyai sensitifitas terhadap isu masyarakat ekonomi asean. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, perlu kiranya diteliti kembali, dari aspek ketenagakerjaan. Bagaimana persepsi tenaga kerja Indonesia terhadap implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN khususnya sektor ketenagakerjaan. Dengan mengetahui persepsi tenaga kerja lokal Indonesia, akan dapat ditarik garis lurus terkait perumusan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tepat.

TELAAH LITERATUR

Teori Persepsi

Persepsi sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti (Kotler, 2000). Mangkunegara (dalam Arindita, 2002) berpendapat bahwa persepsi adalah suatu proses pemberian arti atau makna terhadap lingkungan. Dalam hal ini persepsi menyangkut penafsiran obyek, penerimaan stimulus (Input), pengorganisasian stimulus, dan penafsiran terhadap stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap.

Persepsi pekerja lokal terhadap pemberlakuan MEA diharapkan akan

memberi gambaran sejauh mana implementasi MEA dipahami oleh pekerja sehingga dapat dijadikan salah satu acuan pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan terkait MEA yang bersinggungan langsung dengan tenaga kerja khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Perjalanan Integrasi Ekonomi dalam Perdagangan Dunia

Istilah "Integrasi" dalam ilmu ekonomi pertama kali digunakan dalam konteks organisasi dalam suatu industri sebagaimana dikemukakan oleh (Machlup dalam Jovanovic, 2006). Kata integrasi ini menggambarkan bahwa kombinasi atau menyatukan beberapa perusahaan dalam satu industri baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam konteks yang lebih luas yaitu negara, intergrasi ekonomi menggambarkan penyatuan beberapa negara dalam satu kesatuan yang diawali dengan teori *Custom Union* oleh Viner (1950). Para ekonom menggambarkan integrasi ekonomi dari berbagai sudut pandang yang berbeda antar ekonom. Kondisi inilah yang menyebabkan batasan definisi baku tentang integrasi ekonomi belum juga ditemukan.

Jovanovic (2006) dengan ringkas telah mendokumentasikan berbagai definisi integrasi yang berkembang, antara lain definisi yang dikemukakan oleh Tinbergen, Balassa, Holzman, Kahneert, serta Menis dan Sauvart. Tinbergen (1962) membedakan definisi integrasi sebagai bentuk penghapusan diskriminasi serta kebebasan bertransaksi (*negative integration*) dan sebagai bentuk penyerahan kebijakan pada lembaga bersama (*positive integration*).

Balassa (1961) membedakan integrasi sebagai konsep yang dinamis melalui penghapusan diskriminasi di antara negara yang berbeda, maupun dalam konsep statis dengan melihat ada tidaknya perbedaan dalam diskriminasi. Holzman (dalam Balassa, 1961) menyatakan integrasi ekonomi sebagai situasi ketika dua kawasan menjadi satu atau mempunyai satu pasar yang ditandai harga barang dan faktor produksi yang sama di antara dua kawasan tersebut. Definisi tersebut mengasumsikan bahwa tidak ada hambatan pergerakan barang, jasa

dan faktor produksi serta adanya lembaga yang memfasilitasi pergerakan tersebut.

Dari beberapa definisi integrasi tersebut, Jovanovic (2006) menyimpulkan bahwa konsep integrasi ekonomi merupakan konsep yang cukup kompleks dan harus didefinisikan secara hati-hati. Secara umum, integrasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh sekelompok negara dalam rangka meningkatkan kemakmurannya. Dalam upaya meningkatkan kemakmuran tersebut, integrasi merupakan pilihan kebijakan yang lebih efisien dibanding apabila setiap negara melakukan upaya secara *unilateral*. Definisi integrasi ekonomi secara umum adalah pencabutan (penghapusan) hambatan-hambatan ekonomi diantara dua atau lebih perekonomian (negara). Secara operasional, didefinisikan sebagai pencabutan (penghapusan) diskriminasi dan penyatuan politik (kebijaksanaan) seperti norma, peraturan, prosedur. Instrumennya meliputi bea masuk, pajak, mata uang, undang-undang, lembaga, standarisasi, dan kebijaksanaan ekonomi. Menurut definisi di atas, istilah integrasi ekonomi dibagi menjadi dua pengertian, yakni: a) Penghapusan proteksi lalu lintas barang, jasa, faktor produksi (SDM dan modal) dan informasi dengan kata lain kebebasan akses pasar tergolong dalam integrasi negatif; b) Penyatuan politik (kebijaksanaan) dengan kata kunci harmonisasi, disebut juga integrasi positif.

Di dunia, terdapat 3 arus integrasi ekonomi regional sejak *General Agreement on Tariff and Trade (GAAT)* disepakati pada tahun 1947. Paa arus pertama yaitu integrasi regional eropa di tahun 70-an yang menempatkan Eropa pada posisi pertama perdagangan internasional/global. Arus kedua disebabkan adanya fenomena Amerika yang mengalami ketidakpuasan akan prinsip GAAT yang berakhir pada penggalangan kekuatan dengan hasil membentuk *American Free Trade Agreement (AFTA)* di awal tahun 90-an. Arus ketiga diinisiasi oleh negara-negara asia dengan memperkenalkan preferensi/skema tarif seperti *Economic Cooperation Organization (ECO)*, *South Asian*

Association for Regional Cooperation (SAARC), dan *Association of south-East Asian Nation (ASEAN)*, (Pomfret, 2006: 63-64).

Menurut Bretschger dan Steger (2004: 7-8) manfaat utama integrasi ekonomi yang dapat mendorong integrasi regional berkembang secara global baik di Eropa, Amerika, maupun Asia adalah ekonomi. Integrasi ekonomi akan mendorong ekonomi melalui dua jalur: ukuran integrasi ekonomi dan realokasi sumber daya ekonomi. Meir (1995: 507) juga menjelaskan bahwa integrasi ekonomi di suatu kawasan akan menghasilkan beberapa manfaat bagi negara yang melakukan integrasi, seperti: (1) mendorong berkembangnya industri local; (2) peningkatan manfaat perdagangan melalui perbaikan terms of trade; dan (3) mendorong efisiensi ekonomi di suatu kawasan ekonomi. Menurut Suarez (2000: 1) pembentukan integrasi ekonomi di suatu kawasan ditujukan untuk alokasi sumber daya lebih efisien, mendorong persaingan, dan meningkatkan skala ekonomi dalam produksi dan distribusi di antara negara anggota. Integrasi ekonomi juga mensyaratkan paling tidak adanya beberapa pembagian tenaga kerja dan kebebasan mobilitas barang dan jasa dalam suatu kelompok negara. Integrasi pada tingkatan yang lebih tinggi juga mensyaratkan mobilitas yang bebas atas faktor produksi dalam intra-kawasan, termasuk hambatan pergerakan faktor produksi antar area yang terintegrasi.

Indikator pengukuran integrasi ekonomi sangat berhubungan dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing negara. Semakin besar sumber daya yang dimiliki suatu negara, maka akan mendorong ekonomi untuk memproduksi lebih banyak produk tertentu dan akumulasi produk ini akan mendorong penggunaan sumber daya yang lebih produktif. Fakta empiris yang mendukung teori ini dinyatakan oleh Badinger (dalam Bretschger dan Steger, 2004: 11). Badinger (2001, hal.26) menyatakan bahwa apabila Uni Eropa tidak melakukan integrasi, maka dimungkinkan bahwa PDB per kapita Uni Eropa hanya sebesar seperlima dari PDB per kapita saat ini. Hal ini dimungkinkan terjadi mengingat dengan adanya integrasi menyebabkan terjadinya efisiensi dalam bentuk

petumbuhan ekonomi yang didorong oleh penggunaan teknologi yang mutakhir saat ini.

Terbentuknya AEC menyebabkan ASEAN akan memasuki tahap akhir dari integrasi ekonomi. Pada tahun 1961, teori integrasi ekonomi yang pertama kali dipublikasikan oleh Bela Balassa yang menyatakan bahwa terdapat lima tahapan integrasi yaitu *preferential trading arrangements, free trade area, customs union, common market, dan economic union* (Pomfret 2006, hal.72). Pada saat ini, ASEAN telah menerapkan *ASEAN Free Trade Agreement (AFTA)* sejak tahun 1991

yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan perdagangan berupa tarif antar sesama anggota ASEAN, dan menerapkan *ASEAN Single Window (ASW)* pada tahun 2013 yang bertujuan untuk mengintegrasikan sistem Bea dan Cukai di seluruh kawasan ASEAN (Alomonte, 2013). Dengan penerapan AEC pada tahun 2015 maka pada dasarnya ASEAN akan menerapkan *common market dan economic union* pada saat yang bersamaan. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan tahapan integrasi ekonomi yang dirumuskan oleh Bela Balassa.

Tabel 1. Tahapan Integrasi Ekonomi

Tahapan	Keterangan
<i>Preferential Trade Arrangements</i>	Dibentuk oleh negara-negara yang sepakat menurunkan hambatan-hambatan perdagangan yang berlaku di antara mereka, dan membedakannya dengan yang diberlakukan terhadap negara-negara luar yang bukan anggota. Ini merupakan bentuk integrasi ekonomi yang paling longgar.
<i>Free Trade Area (FTA)</i>	Bentuk integrasi ekonomi yang lebih tinggi dimana semua hambatan perdagangan tarif maupun non-tarif di antara negara-negara anggota telah dihilangkan sepenuhnya, namun masing-masing negara anggota tersebut masih berhak untuk menentukan sendiri apakah mereka hendak mempertahankan atau menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang diterapkannya terhadap negara-negara luar yang bukan anggota.
<i>Customs Union</i>	Mewajibkan semua anggota untuk tidak hanya menghilangkan semua bentuk hambatan perdagangan di antara mereka, namun juga menyeragamkan kebijakan perdagangan mereka terhadap negara-negara Luar yang bukan anggota. Jadi, masing-masing negara anggota tidak lagi bebas menentukan kebijakan komersilnya dengan negara-negara lain.
<i>Common Market</i>	Pada bentuk integrasi ini, bukan hanya perdagangan barang saja yang dibebaskan, namun juga arus-arus faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal. Uni Eropa telah mencapai status <i>common market</i> pada akhir tahun 1992.
<i>Economic Union</i>	Pada tahap ini, harmonisasi atau penyelarasan dilakukan lebih jauh, bahkan dengan menyeragamkan kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal dari masingmasing negara anggota. Ini merupakan tipe kerja sama yang paling tinggi

Sumber: Balassa, 1961.

Perkembangan terbaru yang menarik untuk dianalisis berdasarkan konsep-konsep di atas adalah kecenderungan dibentuknya zona bebas pajak (*duty-free zones*) atau zona ekonomi bebas (*free economic zones*) termasuk invasi tenaga kerja secara besar-besaran dalam skala internasional. Ini merupakan sebuah wilayah kecil yang menjadi bagian dari suatu negara yang sengaja dibebaskan dari berbagai macam pajak untuk

memikat investasi asing (di Indonesia contohnya adalah Pulau Batam). Setiap barang modal atau bahan-bahan mentah yang memasuki wilayah tersebut dibebaskan sama sekali dari berbagai tarif atau pungutan. Tujuannya jelas adalah agar perusahaan-perusahaan internasional mau menempatkan fasilitas produksinya di wilayah tersebut yang selanjutnya akan menciptakan banyak lapangan kerja baru dan memunculkan

dampak-dampak positif yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah sekitarnya. Pada tahun 2015 ini juga sudah diinisiasi apa yang disebut masyarakat ekonomi asean (MEA) yang sejenis dengan *free economic zones* yang nantinya diduga dapat berdampak pada perekonomian Indonesia sendiri khususnya pada sektor ketenagakerjaan.

Ruang Lingkup Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Masyarakat ekonomi ASEAN dibentuk dengan melalui beberapa proses pemikiran dan pertemuan yang panjang. Pada tahun 1997 para pimpinan negara yang tergabung dalam ASEAN mengadakan pertemuan di Kuala Lumpur. Pada pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan terkait ASEAN Vision 2020. Isi kesepakatan tersebut menyatakan bahwa diperlukan transformasi ASEAN menjadi wilayah yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi dan berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pemikiran tersebut dilanjutkan dengan mengadakan pertemuan di Bali pada tahun 2003 yang menghasilkan kesepakatan membentuk *ASEAN Economic Community (AEC)* sebagai salah satu pilar ASEAN Vision 2020 disamping pilar yang lain seperti *ASEAN Security* dan *ASEAN Socio-Cultural Community*.

Dalam usaha mengimplimentasikan AEC, pada tahun 2006 diadakan kembali pertemuan di Kuala Lumpur yang menyepakati *blueprint* untuk mencapai AEC dengan menyediakan target dan jadwal implementasi sekaligus memberikan fleksibilitas bagi negara anggota. Pada tahun 2007, terlihat ada komitmen yang kuat untuk melakukan percepatan implementasi AEC di tahun 2015.

Pentingnya integrasi regional semakin disadari setelah terjadinya *Asian Financial Crisis (AFC)* pada tahun 1997. Akibat AFC, Jepang mulai memikirkan tanggung jawabnya secara regional dan Tiongkok setuju untuk tidak melakukan devaluasi mata uang. Terjadinya krisis ini memberikan dasar bagi negara-negara Asia untuk memikirkan secara lebih jauh mengenai isu-isu terkait Asia Timur dan beberapa usulan untuk meningkatkan hubungan terutama di

wilayah kebijakan moneter pun bermunculan (Gilson, 2006: 227).

Plummer (2006: 433) menyatakan bahwa dengan adanya AFC secara nyata menunjukkan adanya hubungan antara kebijakan eksternal pemerintah di ASEAN, kekecewaan terhadap reaksi Amerika terkait dengan krisis, proses di APEC yang relatif lambat untuk mencapai kerjasama perdagangan dan keuangan, keinginan Jepang untuk membentuk Asian Monetary Fund (AMF) yang ditolak oleh IMF, kesuksesan "New Miyazawa Plan" dan ketidaksesuaian strategi IMF untuk mengatasi AFC.

Dalam *blue print AEC*, disebutkan bahwa terdapat empat karakteristik utama AEC yang saling terkait dan mendukung, yaitu:

1. Pasar dan basis produksi tunggal, yang terdiri dari lima komponen yaitu pergerakan yang bebas untuk barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil.
2. Wilayah yang memiliki ekonomi berdaya saing tinggi, termasuk membangun kebijakan persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, perlindungan hak cipta, pembangunan infrastruktur, penghindaran pajak berganda, dan e-commerce untuk mendukung perdagangan on-line antar anggota ASEAN.
3. Wilayah yang memiliki pembangunan ekonomi yang berkeadilan, meliputi pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan inisiatif integrasi ASEAN yang bertujuan untuk mengatasi perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar anggota ASEAN.
4. Wilayah yang terintegrasi dengan ekonomi global sepenuhnya, yang meliputi pendekatan yang koheren untuk membangun hubungan ekonomi eksternal seperti negosiasi Free Trade Area (FTA) dan Comprehensive Economic Partnership (CEP) dan meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi dan distribusi global.

Dampak Integrasi Ekonomi terhadap Sektor Industri dan Tenaga Kerja

Pada sektor industri, ada penelitian yang dilakukan oleh Karaya

dan Ozgen. Karakaya dan Ozgen (2002) menyatakan bahwa untuk melakukan evaluasi terhadap integrasi ekonomi dapat dilakukan dengan menggunakan *Revealed Comparative Advantage (RCA)*. RCA mampu mengukur keunggulan komparatif masing-masing industri di setiap negara, kemudian berdasarkan distribusi keunggulan komparatif tersebut, maka dapat dieprkirakan dampaknya terhadap kondisi industri di masing-masing negara. Lebih lanjut, Karakaya dan Ozgen (2002) menyatakan bahwa apabila distribusi RCA untuk industri tertentu tidak merata antar negara, maka kondisi tersebut memungkinkan untuk terjadinya saling melengkapi antar negara. Kondisi ini mengarah kepada terciptanya perdagangan (*trade creation*). Dengan menggunakan RCA juga maka dapat diukur seberapa besar kekuatan sebuah grup negara-negara terhadap dunia.

Karakaya dan Ozgen (2002) bertujuan untuk meneliti kemungkinan Turki bergabung dengan Uni Eropa. Karakaya dan Ozgen (2002), berdasarkan perhitungan RCA, menyimpulkan bahwa dengan bergabungnya Turki ke dalam Uni Eropa akan menghilangkan *trade diversion* dan akan lebih menguntungkan bagi Turki. Di sisi lain, kelemahan RCA seperti tidak mencakup aspek yang bersifat dinamis seperti skala ekonomis, kekuatan tawar menawar, dan meningkatnya kompetisi.

Pada sektor ketenagakerjaan, adanya keterbukaan dan integrasi ekonomi akan memungkinkan adanya perubahan dalam ketersediaan dan permintaan tenaga kerja. Ada tiga teori mengenai dampak integrasi terhadap pasar tenaga kerja: teori tradisional perdagangan, teori baru perdagangan, dan teori ekonomi geografi (Longhi dan Nijkamp, 2007: 13).

Teori tradisional perdagangan berdasarkan kepada perbedaan dalam produktivitas antar negara sementara teori perdagangan baru dan ekonomi geografi lebih menekankan kepada produksi, aglomerasi, dan konsentrasi aktivitas di daerah atau wilayah tertentu. Teori tradisional perdagangan menyatakan bahwa setiap negara memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) apabila

dibandingkan dengan negara lain. Dengan adanya liberalisasi perdagangan, maka akan mengakibatkan realokasi produksi dan spesialisasi berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing negara.

Di sisi lain, teori baru perdagangan menekankan kepada hubungan antara perusahaan untuk menerangkan adanya *increasing return* dalam pasar barang dan keuntungan geografis untuk akses ke pasar. Pada saat liberalisasi pasar terjadi, aktivitas produksi yang bersifat *increasing return* akan berada di daerah yang memiliki akses yang bagus ke pasar.

Teori ekonomi geografi, mengasumsikan bahwa adanya keuntungan geografis dari pasar yang besar dan spesialisasi merupakan hasil dari aglomerasi aktivitas ekonomi. Pergerakan tenaga kerja dalam suatu wilayah dapat menghasilkan efek aglomerasi seperti dalam kasus integrasi Amerika dan Meksiko.

Das (2014) menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang akan mempengaruhi pasar tenaga kerja di MEA. Pertama, terjadinya perubahan struktur dalam ekonomi domestik masing-masing negara anggota ASEAN akan mempengaruhi pasar tenaga kerja. Terjadi realokasi sumber daya tenaga kerja dari aktivitas yang kurang produktif menuju aktivitas yang lebih produktif. Sebagai contoh, dalam dua dekade terakhir, negara-negara ASEAN mengalami penurunan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang sebagian besar bermigrasi ke sektor jasa.

Das (2014) juga menyatakan bahwa berdasarkan laporan dari ILO dan ADB, dengan berlakunya MEA akan meningkatkan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian, perdagangan, transportasi, dan konstruksi pada tahun 2025. Indonesia sendiri akan mengalami peningkatan sebesar 1,9 juta tenaga kerja untuk sektor-sektor tersebut. Dampak kedua adalah terjadinya pergeseran permintaan akan pekerjaan tertentu terutama pekerjaan yang membutuhkan sedikit keahlian. Dengan adanya *Mutual Recognition Arrangements (MRAs)* untuk tenaga kerja profesional maka akan mempengaruhi pasar tenaga kerja. MRA akan memberikan dorongan bagi bertumbuhnya tenaga kerja terampil seperti teknisi, arsitektur, perawat,

akuntan, serveyor, kesehatan, dan perawatan gigi. Dari kondisi ini, peraturan domestik setiap negara terkait mobilisasi tenaga kerja terampil ini diperkirakan masih akan menjadi penghambat utama di masing-masing negara ASEAN. Das (2014) menyimpulkan bahwa dengan adanya MEA tidak akan mengubah pasar tenaga kerja secara drastis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi masyarakat terkait diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) khususnya pada sektor tenaga kerja. Jenis penelitian ini merupakan kuantitatif deskriptif. Data primer digunakan dalam penelitian ini dengan langsung melakukan penyebaran kuesioner pada masyarakat dengan penggolongan sampel berdasarkan klasifikasi tertentu (*Stratified Random Sampling*). Klasifikasi sampel yang diambil adalah responden yang kebetulan bekerja menjadi tenaga kerja di perusahaan swasta/karyawan.

Di awal proses peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 200 kuesioner kepada responden yang di pilih berdasarkan teknik pengambilan sampel diatas. Peneliti dibantu

beberapa *enumerator* dalam melakukan penyebaran kuesioner. Dari 200 kuesioner yang disebar, hanya 174 kuesioner yang dikembalikan dan hanya 162 yang mampu menjawab seluruh pertanyaan secara lengkap. Hasil akhir 162 kuesioner inilah yang diambil data nya dan dianalisa menjadi sebuah hasil penelitian.

Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada responden terkait persepsi tenaga kerja lokal terhadap diberlakukannya MEA di Indonesia. Penelitian ini menggunakan skala likert dengan menggunakan 5 titik. Kategori penelitian yakni "sangat tidak setuju", "tidak setuju", "netral", "setuju", dan "sangat setuju" dengan secara berurutan menggunakan nilai 1-5. Untuk Variabel yang digunakan dalam peniltian ini adalah tentang persepsi pelaku usaha dimana terdiri dari beberapa poin yang diambil dari penelitian Fernandes dan Andadari 2012, yaitu: Pengetahuan tentang MEA, Implikasi pemberlakuan MEA, Kesiapan diri menghadapi MEA dan Peran pemerintah dalam menghadapi MEA. Variabel persepsi dalam kuesioner penelitian ini terdiri dari 20 item pertanyaan, sebagai berikut:

Tabel 2. Deskripsi Item Pertanyaan

Variabel Penelitian	Item	Deskripsi
Pengetahuan tentang MEA	1	Pengetahuan tentang jumlah negara ASEAN
	2	Pengetahuan tentang jumlah negara yang
	3	tergabung dalam ASEAN Sumber informasi MEA
Implikasi pemberlakuan MEA	1	Dukungan pelaku usaha batik tentang adanya MEA
	2	Peran pemerintah menghadapai MEA
	3	Pendapat pelaku usaha tentang dampak positif dari MEA
	4	Pendapat pelaku usaha tentang dampak negatif dari MEA
	5	Pendapat pelaku usaha tentang dampak negatif dari MEA
	6	Pendapat pelaku usaha tentang tenaga kerja Indonesia untuk bersaing dengan tenaga kerja asing. Pendapat pelaku usaha tentang keahlian dasar yang harus dimiliki tenaga kerja Indonesia untuk menghadapai MEA.
Kesiapan diri menghadapai MEA	1	Kemampuan mandiri dalam menghadapai persaingan
	2	MEA
	3	Peningkatan untuk menghadapai MEA
	4	Pendapat pelaku tenaga kerja tentang tenaga kerja yang mampu bersaing di MEA
	5	Perubahan rate/gaji untuk menghadapai MEA
	6	Pelatihan dan training untuk bersaing di MEA
	7	Kemampuan bahasa asing untuk menghadapai
	8	persaingan di MEA

	9	Kecocokan manajemen pengelolaan tenaga kerja untuk MEA Peningkatan jumlah tenaga trampil untuk menghadapi MEA Peningkatan pemerataan tenaga kerja menghadapi MEA
Peran pemerintah dalam menghadapi MEA	1 2	Pemerintah memfasilitasi tenaga kerja untuk menghadapi MEA Pendapat tenaga kerja tentang hubungan dengan negara lain untuk memberikan jalan bagi tenaga kerja Indonesia

Data diolah dari berbagai referensi.

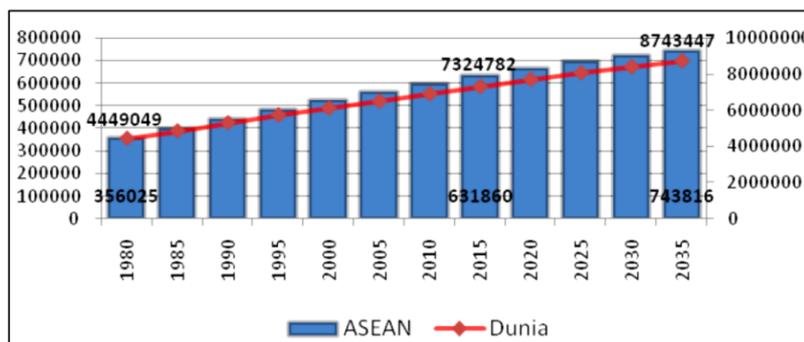
Data yang dihasilkan dari kuesioner diatas, diolah secara deskriptif dengan bantuan statistik. Hasil pengujian statistik di bahas secara rinci untuk mengerucutkan tema ke dalam sebuah jawaban penelitian yaitu kesimpulan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN
Tenaga Kerja Lingkup ASEAN**

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa MEA tidak hanya berkuat pada trasaksi barang dan jasa antar negara saja, akan tetapi juga termasuk tenaga kerja baik terampil maupun ahli. Hal ini menjadikan Indonesia perlu dianalisis bagaimana posisinya. Sebelum menganalisa kondisi Indoensia maka perlu dianalisa dan dikomparasi bagaimana data tenaga kerja lingkup dari ASEAN yang sangat beragam kondisi dan keunggulan-keunggulannya.

Berdasarkan data dari Divisi Populasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jumlah penduduk di 10 negara

anggota ASEAN diperkirakan akan mencapai 743,8 juta jiwa pada 2035 atau meningkat cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2010 yang sebanyak 596 juta jiwa. Dengan jumlah populasi ASEAN yang sekitar 743,8 juta jiwa pada tahun 2035 tersebut, proporsi jumlah penduduk ASEAN akan menjadi sekitar 8,51 persen dari total penduduk dunia pada tahun 2035 yang diperkirakan mencapai lebih dari 8,7 miliar jiwa. Dari sisi porsi jumlah penduduk ASEAN terhadap total penduduk dunia, dalam periode 1980 hingga 2010, besaran porsinya berada dalam kisaran 8-9 persen dalam periode 1980 hingga 2010. Pada tahun 1980 misalnya, jumlah populasi ASEAN sebanyak 356 juta jiwa atau sekitar 8 persen dari total penduduk dunia tahun 1980 yang mencapai 4,4 miliar jiwa, sedangkan pada tahun 1990 jumlah penduduk ASEAN meningkat menjadi 443 juta jiwa atau sekitar 8,33 persen dari total penduduk dunia tahun 1990 yang sebesar 5,3 miliar jiwa.



**Gambar 1. Jumlah Populasi ASEAN dan Dunia
Sumber: PBB**

Untuk tahun 2000, jumlah populasi ASEAN mencapai 523,5 juta

jiwa atau sekitar 8,54 persen dari total penduduk dunia tahun 2000 yang

sebesar 6,13 miliar jiwa. Sementara, di tahun 2010 jumlah populasi ASEAN meningkat menjadi 596 juta jiwa atau sekitar 8,62 persen dari total penduduk dunia tahun 2010 yang mencapai 6,9 miliar jiwa. Dalam implementasi MEA pada tahun 2015, jumlah populasi

ASEAN diperkirakan mencapai 631,9 juta jiwa atau sekitar 8,63 persen dari total penduduk dunia tahun 2015 yang diperkirakan mencapai 7,3 miliar jiwa. Untuk perkembangan detail jumlah populasi ASEAN dan dunia, bisa dilihat dalam Gambar 1 dan Tabel 3.

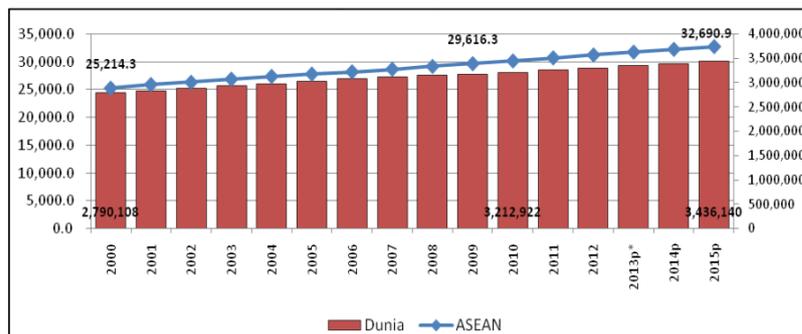
Tabel 3. Populasi ASEAN dan Dunia (dalam ribu)

Tahun	ASEAN	Dunia	Proporsi
1980	356025	4449049	8.00%
1985	399171	4863602	8.21%
1990	442984	5320817	8.33%
1995	484197	5741822	8.43%
2000	523557	6127700	8.54%
2005	560844	6514095	8.61%
2010	596017	6916183	8.62%
2015	631860	7324782	8.63%
2020	664824	7716749	8.62%
2025	694732	8083413	8.59%
2030	721234	8424937	8.56%
2035	743816	8743447	8.51%

Sumber: PBB

Dari sisi pasar tenaga kerja, porsi angkatan kerja ASEAN terhadap total angkatan kerja dunia dalam periode 1990 hingga 2010 berada dalam kisaran 8-9 persen. Pada tahun 1991 misalnya, jumlah angkatan kerja ASEAN sebesar 203,3 juta jiwa atau sekitar 8,44 persen dari total angkatan kerja dunia tahun 1991 yang mencapai 2,4 miliar jiwa, sedangkan pada tahun 1998 jumlah angkatan kerja ASEAN meningkat menjadi 238,7 juta jiwa atau dengan porsi 8,85 persen dari total angkatan kerja dunia tahun 1998 yang sekitar 2,7 miliar jiwa. Sementara itu, pada tahun 2000, jumlah angkatan kerja ASEAN menjadi 252,1 juta jiwa

atau sekitar 9,04 persen dari total angkatan kerja dunia tahun 2000 yang mencapai 2,79 miliar jiwa dan pada tahun 2010 jumlah angkatan kerja ASEAN meningkat menjadi 301 juta jiwa atau sekitar 9,37 persen dari total angkatan kerja dunia tahun 2010 yang sebesar 3,2 miliar jiwa. Dalam implementasi MEA pada tahun 2015, jumlah angkatan kerja ASEAN diperkirakan mencapai 326,9 juta jiwa atau sekitar 9,51 persen dari total angkatan kerja dunia tahun 2015 yang diperkirakan mencapai 3,4 miliar jiwa. Untuk perkembangan detail jumlah angkatan kerja ASEAN dan dunia, bisa dilihat dalam Grafik di bawah ini.



Gambar 2. Jumlah Angkatan Kerja ASEAN dan Dunia (ribu)
Sumber: ILO

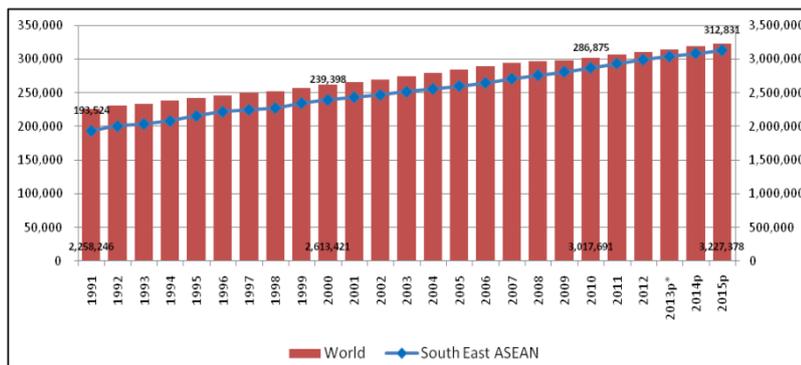
Jika ditinjau dari porsi angkatan kerja ASEAN yang bekerja terhadap total angkatan kerja dunia yang bekerja, tampak bahwa dalam periode

1990 hingga 2010 porsinya berada dalam kisaran 8-10 persen dengan tren perkembangan yang terus meningkat. Pada tahun 1991 misalnya, jumlah

angkatan kerja ASEAN yang bekerja sekitar 193,5 juta jiwa atau sekitar 8,57 persen dari total angkatan kerja dunia yang bekerja di tahun 1991 yang mencapai 2,3 miliar jiwa, sedangkan pada tahun 2000 jumlah angkatan kerja ASEAN yang bekerja meningkat signifikan menjadi 239,4 juta jiwa atau dengan porsi sekitar 9,16 persen dari total angkatan kerja dunia yang bekerja di tahun 2000 yang mencapai 2,6 miliar jiwa.

Pada tahun 2010, jumlah angkatan kerja ASEAN yang bekerja menjadi sekitar 286,9 juta jiwa atau

dengan porsi mencapai 9,51 persen dari total angkatan kerja dunia yang bekerja di tahun 2010 yang sebesar 3,0 miliar jiwa. Sementara, dalam implementasi MEA pada tahun 2015, jumlah angkatan kerja ASEAN yang bekerja diperkirakan meningkat menjadi 312,8 juta jiwa atau sekitar 9,69 persen dari total angkatan kerja dunia yang bekerja pada tahun 2015 yang diperkirakan mencapai 3,2 miliar jiwa. Untuk perkembangan detail jumlah angkatan kerja ASEAN dan dunia yang bekerja, bisa dilihat dalam Grafik di bawah ini.

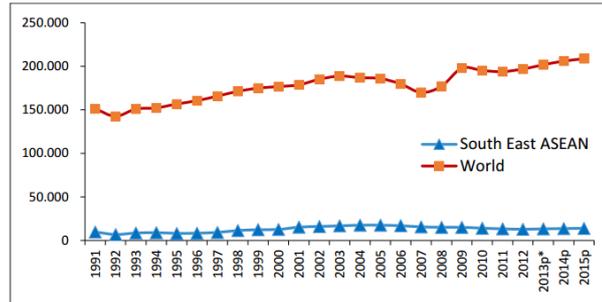


Gambar 3. Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja di ASEAN dan Dunia (ribu)
Sumber: ILO

Sementara itu, dari sisi porsi jumlah pengangguran ASEAN terhadap total pengangguran dunia dalam periode 1990 hingga 2010 porsinya berada dalam kisaran 5-9 persen dengan tren kecenderungan yang terus menurun secara relatif. Pada tahun 1991 misalnya, jumlah pengangguran di ASEAN mencapai 9,8 juta jiwa atau sekitar 6,5 persen dari total pengangguran dunia tahun 1991 yang sebesar 151,2 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2000 jumlah pengangguran di ASEAN meningkat menjadi 12,7 juta jiwa atau sekitar 7,2 persen dari total pengangguran dunia tahun 2000 yang sebesar 176,7 juta jiwa. Pengangguran di kawasan ASEAN berada pada titik yang tinggi di tahun 2005 yakni sekitar

17,7 juta jiwa atau sekitar 9,5 persen dari total pengangguran dunia tahun 2005 yang sebesar 186 juta jiwa.

Pada tahun 2010, jumlah pengangguran di ASEAN menjadi 14,2 juta jiwa atau sekitar 7,27 persen dari total pengangguran dunia tahun 2010 yang sebesar 195,2 juta jiwa. Sementara, dalam implementasi MEA pada tahun 2015, jumlah pengangguran di ASEAN diperkirakan mencapai 14,1 juta jiwa atau sekitar 6,74 persen dari total pengangguran dunia pada tahun 2015 yang diperkirakan mencapai 208,8 juta jiwa. Untuk perkembangan detail jumlah pengangguran ASEAN dan dunia, bisa dilihat dalam Grafik di bawah ini.



Gambar 4. Jumlah Pengangguran di ASEAN dan Dunia (ribu)
Sumber: ILO

Invasi Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Indonesia adalah negara anggota ASEAN yang memiliki sumber daya alam melimpah dan juga sumber daya manusia yang terbesar. Akan tetapi dengan semakin terbukanya aliran barang dan jasa, terutama pergerakan tenaga kerja (*movement natural person*), maka sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia akan diperebutkan oleh sumber daya manusia Indonesia sendiri dan ditambah dengan sumber daya manusia dari negara-negara anggota ASEAN lainnya. Dari kondisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hanya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan yang berkualitas yang akan dapat mengelola sumber daya alam dengan lebih efektif dan efisien. Hanya sumber daya manusia dengan keterampilan berkualitas yang akan dapat berperan aktif dalam proses produksi, baik dalam tingkatan sebagai pemilik badan usaha, manajer perusahaan, juga sebagai pekerja atau buruh. Kualitas sumber daya manusia Indonesia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada urutan keenam, yaitu dibawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan bahkan Filipina. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia hanya dapat unggul dari Vietnam, Laos, Kamboja, serta Myanmar berdasarkan pada data Human Development Index (HDI) tahun 2012.

Kualitas sumber daya manusia Indonesia yang rendah tersebut berhubungan langsung dengan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia. Dengan adanya perdagangan bebas antar negara dimana tidak terdapat pembatasan terhadap pergerakan tenaga kerja dari

negara-negara lain ke Indonesia, maka dapat diyakinkan bahwa tenaga kerja Indonesia hanya akan menjadi penonton di negaranya sendiri. Untuk mengantisipasi kondisi ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Beberapa ketentuan yang terdapat dalam peraturan menteri tersebut menyatakan bahwa tenaga kerja asing dapat bekerja di Indonesia melalui prinsip sponsorship dan tidak diizinkan perseorangan sebagai sponsor. Selain itu, tenaga kerja asing hanya dapat bekerja untuk jabatan direktur, manajer dan technical expert, serta tidak dapat menduduki jabatan yang berkaitan dengan personalia. Juga ditetapkan bahwa persyaratan jabatan tenaga kerja asing mengacu kepada standar kompetensi serta dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

Dengan akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka Indonesia akan menjadi pasar utama yang besar, baik untuk arus barang maupun investasi. Hal ini didukung oleh share jumlah penduduk Indonesia, yaitu sekitar 43 persen dari total sekitar 600 juta penduduk di 10 negara anggota ASEAN. Dari sisi tenaga kerja, maka terdapat peluang yang besar bagi para pencari kerja karena nantinya akan tersedia lapangan kerja yang luas dengan berbagai macam kebutuhan keahlian. Selain itu juga, akses untuk pergerakan ke luar negeri dalam rangka mencari dan memperoleh pekerjaan akan menjadi lebih besar dengan berkurangnya hambatan. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN juga akan menjadi peluang yang besar bagi para wirausahawan untuk mencari tenaga

kerja terbaik yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

Keadaan ini akan menimbulkan risiko ketenagakerjaan untuk Indonesia. Dari sisi pendidikan dan produktivitas, Indonesia masih belum dapat bersaing dengan tenaga kerja dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Diperkirakan sekitar setengah dari tenaga kerja sangat terampil di negara-negara ASEAN akan bekerja di Indonesia. Akan tetapi sebagian besar lapangan pekerjaan tersebut justru akan diperebutkan oleh para calon tenaga pekerja yang kurang terlatih serta kurangnya pendidikan. Maka dapat diperkirakan bahwa kesenjangan keterampilan tersebut akan mengurangi tingkat produktivitas serta daya saing Indonesia.

Beberapa tantangan yang dihadapi ketenagakerjaan di Indonesia adalah: a) masih tingginya jumlah pengangguran terselubung (*disguised unemployment*); b) masih rendahnya jumlah wirausahawan baru yang diperlukan untuk mendorong perluasan kesempatan kerja; c) tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh tenaga kerja tidak terdidik sehingga tingkat produktivitasnya masih rendah; d) meningkatnya jumlah pengangguran terdidik yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan di pasar tenaga kerja; e) masih adanya ketimpangan produktivitas tenaga kerja antar sektor ekonomi; f) sektor informal masih mendominasi lapangan pekerjaan dan sektor ini belum mendapat perhatian yang signifikan dari pemerintah; g) pengangguran di Indonesia masih yang tertinggi dari 10 negara ASEAN; h) adanya tuntutan pekerja terhadap upah minimum, tenaga kontrak, dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan i) masalah Tenaga Kerja Indonesia yang banyak tersebar di luar negeri.

Persepsi Tenaga Kerja Lokal terhadap Invasi Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Jumlah responden yang mengisi kuesionernya secara lengkap sebesar 162. Karakteristik responden tersebut meliputi 49 (30.24%) responden adalah laki-laki dan 113 (69.76%) responden adalah perempuan. Mayoritas responden sebesar 87 orang (53.70%) mengetahui tentang seluruh

negara anggota ASEAN selain Indonesia. Sementara responden yang mengetahui separuh negara ASEAN sebesar 32 orang (19.75%). Sedangkan hanya 6 orang (3.7%) yang hanya mengetahui 1 negara ASEAN yaitu Indonesia saja.

Dari 162 responden, masih belum semua memahami secara menyeluruh aspek utama dalam MEA, yakni 5 elemen pokok dalam pilar utama pelaksanaan MEA. Sebagian besar responden atau sebesar 35.19% mengetahui dengan terimplimentasinya MEA, maka akan terjadi arus barang dan jasa saja. Kemudian yang mengetahui arus bebas tenaga kerja saja hanya 18.52%. Sedang yang mengetahui dengan adanya MEA maka akan terjadi arus bebas investasi dan modal saja sebesar 14.20%. Untuk yang mengetahui keempat pilar MEA yaitu arus bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja saja cukup banyak yaitu sebesar 26.54%. dan yang mengetahui kelima elemen pilar MEA sebagian kecil saja yaitu sebesar 5.56%.

Ini bisa saja disebabkan sumber informasi terkait MEA yang diperoleh responden tidak terlalu menjelaskan secara rinci dan detail tentang MEA. Ada sebesar 52 responden yang menjelaskan mendapatkan informasi MEA hanya dari 1 sumber saja. 43 responden menyatakan mengetahui MEA dari 2 sumber dan 23 responden mengetahui dari 3 sumber. Sedangkan yang mengetahui MEA dari 4 sumber hanya 32 responden dan sebagian kecil yaitu sebesar 12 responden mengetahui MEA dari 5 sumber informasi. Jika dilihat dari jenis sumber informasi yang didapat, hal ini menunjukkan data yang cukup menarik. Ada sebesar 50.62% responden mendapatkan informasi MEA justru dari media sosial. Dan 20.99% mereka mendapatkan informasi MEA dari sumber surat kabar elektronik. Hanya 17.28% saja yang mendapatkan informasi MEA dari Televisi dan 7.41% mendapatkan info MEA dari Surat kabar cetak (koran). Dan sebagian kecil atau sebesar 3.7% mendapatkan informasi tentang MEA dari radio. Hal ini menjadikan media sosial mendapatkan perhatian serius dan merupakan fenomena yang berubah dari generasi ke generasi. Dan perkembangannya patut

diperhitungkan untuk strategi informasi masa mendatang.

Pada implementasi setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra di beberapa elemen masyarakat. Termasuk juga pada implementasi MEA. Berdasarkan hasil penelitian ini, Sebesar 63% responden yang notabene berasal dari tenaga kerja (karyawan perusahaan swasta di Indonesia) tidak menyetujui adanya MEA. Dan sisanya sebesar 34% menyetujui adanya MEA. Kelompok responden yang tidak menyetujui mereka beralasan bahwa dengan MEA Indonesia belum siap bersaing dengan negara-negara di ASEAN. Lapangan kerja akan semakin tergerus dengan kedatangan/invasi tenaga kerja asing ke Indonesia sehingga persaingan tenaga kerja akan semakin terbuka dengan kondisi tenaga kerja Indonesia yang kurang trampil. Daya saing Indonesia di mata dunia masih pada level rendah. Potensi Indonesia sebenarnya ada, namun belum terkelola secara maksimal. Dan MEA justru akan menjadikan jurang persaingan antar negara ASEAN menjadi lebih sengit dan kompetitif. Belum lagi masalah infrastruktur Indonesia yang masih perlu banyak pembenahan. Dari sisi kasus yang terjadi, kasus terorisme masih menjadi musuh bersama yang nantinya dikhawatirkan akan mengganggu perekonomian Indonesia dimana Indonesia akan dikenal dengan negara sarangnya teroris, dan penyelundupan-penyelundupan yang dilakukan oleh teroris baik barang maupun alat persenjataan akan dikhawatirkan semakin merajalela dikarenakan adanya pasar bebas yang kurang terkendali. Dan belum lagi masalah korupsi yang semakin masif.

Pembahasan

Salah satu harapan terbesar dalam mensejahterakan masyarakat adalah dengan mengurangi tingkat pengangguran. Dengan berkurangnya penganggura, kesejahteraan hidup yang diharapkan masyarakat akan tercapai. MEA memberikan peluang besar dalam mencapai hal tertentu. Di sisi lain MEA juga dapat menjadikan perangkap dan kesulitan bersaing dengan bangsa lain jika tidak ditata dan dipersiapkan dengan baik dengan dukungan pemerintah. Tenaga kerja

dapat mencari pekerjaan di negara ASEAN lain yang menjanjikan kesejahteraan hidup yang lebih baik. Dengan harapan kesejahteraan hidup yang lebih baik, implementasi MEA akan mendorong para pekerja untuk mencari pekerjaan di negara lain yang merasa lebih menjanjikan dari negara mereka sendiri. Singapura menjadi pilihan negara terbanyak diantara negara-negara. Hal ini disebabkan Singapura sebagai negara dengan ekonomi terkuat ASEAN. Kemudian disusul oleh Malaysia dan Thailand sebagai pilihan lainnya. Negara ASEAN lainnya menjadi negara yang kurang diminati berdasarkan pilihan responden. Alasan mereka memilih ketiga negara tersebut dikarenakan alasan gaji di negara tersebut yang tinggi, kapasitas pekerja akan dimanfaatkan secara optimal, dan alasan lain seperti budaya dari ketiga negara tersebut relatif sama.

Pada kondisi Indonesia, tenaga kerja asing sudah mulai berdatangan. Rata-rata tenaga kerja asing datang dengan beberapa proyek yang sudah disiapkan. Kondisi Indonesia yang sedang berkembang dari sisi infrastruktur terutama berdampak pada bertambahnya proyek-proyek manufaktur pembangunan seperti jalan raya, jembatan, kereta cepat, dan lain sebagainya. Hal ini membuat negara lain, sering melirik proyek-proyek tersebut. Sebagai contoh Proyek kereta cepat yang hari ini dikerjakan oleh China. Rata-rata proyek yang dikerjakan oleh asing, juga berkonsekuensi mendatangkan tenaga dari negara pemenang proyek tersebut. Konsensi lah yang menyebabkan hal ini bisa terjadi dan dikhawatirkan akan meningkatkan pengangguran tenaga kerja lokal karena tenaga kerja lokal sulit bersaing dengan tenaga kerja asing.

Berdasarkan data dari aspek perusahaan, sebagian besar responden beranggapan bahwa sebagian besar perusahaan lokal dan perusahaan asing di Indonesia memilih untuk memperkerjakan tenaga kerja Indonesia meskipun tenaga kerja asing memiliki kompetensi yang lebih bagus dan meminta gaji yang cukup bersaing dengan tenaga kerja lokal. Ini bisa jadi didasari dari harapan dan keinginan dari para responden agar perusahaan-perusahaan lokal lebih mengutamakan

kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan memperkerjakan tenaga kerja lokal dibandingkan tenaga kerja asing. Hal ini dikarenakan dengan memperkerjakan tenaga kerja lokal akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Namun ada dampak negatif yang sampai saat ini cukup sulit diantisipasi oleh perusahaan ketika terjadi konflik antara perusahaan dan pekerja lokal melalui serikat pekerjaanya.

Akan tetapi, ada kenyataan berbeda ditemukan dari perusahaan asing yang berpotensi besar untuk membuka pabriknya di Indonesia. Seperti perusahaan sepatu NIKE, perusahaan Bosch Produsen peralatan rumah tangga asal Jerman. Perusahaan ini memiliki pasar yang besar di Indonesia, jauh lebih besar dari Malaysia. Namun keduanya memilih membuka pabrik di Malaysia daripada di negara Indonesia. Hal ini sangat disayangkan, mengingat apabila keduanya membuka pabrik di Indonesia akan berdampak positif yang sangat besar dalam investasi dan peluang kerja di Indonesia. Alasan mereka membuka pabrik di Malaysia adalah karena infrastruktur Indonesia tidak lebih baik daripada negara Malaysia. Belum lagi isu kualitas sumber daya manusia yang jaga dijadikan alasan klasik (vivanews, 2013). Fakta ini secara langsung menunjukkan bahwa pada dasarnya kualitas dari tenaga kerja Indonesia masih kalah dibandingkan dengan negara tetangga. Untuk itulah perlu peningkatan kompetensi dari tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing lainnya. Kondisi diatas bertolak belakang dengan fakta bahwa para pekerja lokal masih menganggap kompetensi para pekerja Indonesia setara dengan kompetensi tenaga kerja asing. Para responden menganggap tenaga kerja asing tidak selalu lebih baik daripada tenaga kerja lokal, kompetensi diantara keduanya bisa bersaing.

Namun hal ini berbeda dengan fakta bahwa sebagian besar tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia menduduki posisi-posisi yang strategis. Data dari Bank Indonesia (laporan survey tenaga kerja asing di Indonesia tahun 2009) yang mensurvey para tenaga kerja asing di Indonesia yang mayoritas berpendidikan Strata 1 (S1)

yang memiliki pengalaman kerja antara kurang dari 1 tahun hingga lebih dari 1 tahun menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja asing yang ada di Indonesia bekerja sebagai profesional/teknisi. Rata-rata gaji yang diterima oleh para tenaga kerja asing tersebut sangat tinggi apabila dibandingkan dengan tenaga kerja lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian terkait persepsi pekerja lokal terhadap invasi tenaga kerja asing akibat implementasi MEA dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Masih banyak tenaga kerja lokal yang belum mengetahui tentang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan mulai berjalan pada tahun 2015 ini. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dan dari tenaga kerja yang mengetahui tentang MEA mendapat informasi tersebut melalui internet. Padahal masih banyak media yang dapat digunakan untuk mensosialisasikannya. Selain dari pemerintah, sosialisasi sebenarnya dapat pula dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan yang merupakan penghasil tenaga kerja. Lembaga-lembaga pendidikan khususnya pendidikan tinggi seperti universitas contohnya, berpotensi berpotensi besar untuk membantu pemerintah melakukan sosialisasi terhadap MEA.
- Tenaga kerja yang mengetahui tentang pemberlakuan MEA pada tahun 2015, sudah memahami implikasi yang akan mereka hadapi ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN berjalan. Namun, gambaran yang dimiliki para tenaga kerja tentang dampak pelaksanaan MEA masih sangat jauh dari kenyataan yang saat ini terjadi. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya informasi mereka tentang kondisi tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja asing.
- Tenaga kerja yang mengetahui tentang pelaksanaan MEA sudah memiliki kesadaran untuk meningkatkan kompetensi mereka

agar dapat bersaing dalam Masyarakat ekonomi ASEAN nantinya. Tenaga kerja sudah cukup menyiapkan diri dalam menghadapi MEA dengan membekali diri sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Namun tenaga kerja masih belum memiliki gambaran dalam menilai kompetensi mereka dibandingkan dengan tenaga kerja asing.

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut akan dijelaskan mengenai implikasi terapan dari analisis dan bahasan analisis dari penelitian yang dilakukan;

- a. Hasil penelitian tentang pengetahuan Masyarakat Ekonomi ASEAN menunjukkan bahwa tenaga kerja belum memahami secara mendalam tentang pelaksanaan MEA. Padahal dengan mengetahui konsep yang diusung dalam MEA akan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada mereka tentang peluang dan tantangan yang akan mereka hadapi nantinya.
- b. Masih kurangnya pengetahuan tenaga kerja tentang pelaksanaan MEA menunjukkan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakatnya. Tenaga kerja yang merupakan pelaku perekonomian di perusahaan saja masih belum memahami tentang MEA, apalagi masyarakat pada umumnya. Untuk itulah pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi tentang MEA kepada masyarakat. Khususnya tentang apa yang perlu mereka siapkan dalam menghadapi MEA nantinya.
- c. Tenaga kerja sudah memiliki kesadaran untuk meningkatkan kompetensi mereka, sehingga perlu didukung. Untuk itulah peran serta universitas sebagai pencetak tenaga kerja sangat diharapkan mampu mewujudkan hal tersebut dengan lebih menekankan pada kualitas lulusan yang sesuai dengan tuntutan para penyedia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Almonte, L.** (2013). *ASEAN Single Window Takes Regional Grouping Closer to Integration*. Online. <http://www.portcalls.com/aseansingle-window-takes-regional-grouping-closer-to-integration>, Diakses pada 23 Maret 2015.
- Balassa, B.** 1961. *The Theory of Economic Integration*. Homewood (IL): Richard D. Irvin.
- Bank Indonesia.** 2008. *Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*. Jakarta: TP. Elex Media Komputindo, Kelompok Kompas Gramedia.
- Bank Indonesia.** 2009. *Laporan Survey Tenaga Kerja Asing di Indonesia tahun 2009*. Jakarta.
- Bapenas.** 2012. *Penurunan Peringkat Daya Saing Indonesia Tahun*. Online. <http://www.bappenas.go.id/blog/penurunan-peringkat-daya-saing-indonesia-tahun-2012/> diakses pada tanggal 16 Desember 2013
- Bretschger, L and T.M. Steger.** 2004. *The Dynamics of Economic Integration: Theory and Policy*. WIF: Institute of Economic Research Working Paper 04/32.
- Das, S.B.** 2014. *The ASEAN Economic Community's labour policy needs work*. Diakses pada 7 Mei 2015. <http://www.straitstimes.com/news/opinion/more-opinionstories/story/work-needed-asean-community-labour-policy-20140904>.
- Fadli, Muhammad.** 2014. *Optimalisasi Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. Online. <http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%208%20JRV%203%20NO%202%20PROTECT.pdf>, diakses tanggal 20 Maret 2015.
- Gilson, J.** 2006. "Region Building in East Asia: ASEAN Plus Three and Beyond". In *Integration in Asia and Europe: Historical Dynamics, Political Issues, and Economic Perspective*. Paul J.J. Welfens, Franz Knipping, Suthiphand Chirathivat, dan Cillian Ryan (eds), Heidelberg: Springer.

- IPB.** 2014. *Kajian Teoritis Integrasi Ekonomi*. Online. <http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/55235/6/BA%20III%20Kajian%20Teoritis%20....pdf>, diakses tanggal 20 Maret 2015.
- Jovanovic, F.** 2006. *Integration, disintegration and trade in Europe: Evaluation of trade relation during the 1990s*. Working Paper No. 20
- Karakaya, E. dan F.B. Ozgen.** 2002. *Economic Feasibility Of Turkey's Economic Integration With The EU: Perspectives from Trade Creation and Trade Diversion*. Diakses pada tanggal 7 Mei 2015.
- Kemenkeu.** 2014. *Dampak Asean Economis Community terhadap Sektor Industri dan Jasa, serta Tenaga Kerja di Indonesia*. Online. <http://www.kemenkeu.go.id/site/default/files/Kajian%20Dampak%20ASEAN.pdf>, diakses tanggal 20 Maret 2015.
- Longhi, S. dan P. Nijkamp.** 2007. "Economic Integration and Labour Markets: Ways Forward". In *Regionalisation, Growth, and Economic Integration*. George M. Korres (ed). Heidelberg: Physica-Verlag.
- Meier, G.M.** 1995. *Leading Issues in Economic Development*. NY: Oxford University Press.
- Plummer, M.G.** 2006. *ASEAN-EU Economic Relationship: Integration and Lessons for the ASEAN Economic Community*. *Journal of Asian Economics* 17, pp. 427-447
- Pomfret, R.** 2006. "Sequencing Regional Integration in Asia". In *Advanced Research in Asian Economic Studies Vol.3: International Economic Integration and Asia*. Michael G. Plummer dan Erik Jones (eds). New Jersey: World Scientific.
- Rahman, M. Ari Sabilah.** 2015. *Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*. Online. [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/04/10.M.Ari%20Sabilah%20R%20\(04-27-15-03-10-08\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/04/10.M.Ari%20Sabilah%20R%20(04-27-15-03-10-08).pdf), diakses tanggal 22 Mei 2015.
- Suarez, M.D.L.C.** 2001. *Trade Creation and Trade Diversion for Mercosur*. Dissertation. Boston University
- Tinbergen, J.** 1962. *An Analysis of World Trade Flows in Shaping the World Economy*. edited by Jan Tinbergen. New York: NY Twentieth Century Fund.
- Viner, Jacob.** 1950. *The Customs Union Issue, Carnegie Endowment for International Peace*. New York.
- Vivanews.** 2014. *Nikmati Pasar RI, Asing malah pilih Malaysia*. Online. [Fokus.news.viva.co.id/news/read/245399/nikmati-pasar-ri-asing-malah-pilih-malaysia/](http://fokus.news.viva.co.id/news/read/245399/nikmati-pasar-ri-asing-malah-pilih-malaysia/), diakses tanggal 2 April 2015.
- World Bank.** 2014. *Logistic Performance Index (LPI)*. Washington DC: World Bank.
- World Bank.** 2014. *Ease of Doing Business Index*. Washington DC: World Bank.
- World Economic Forum.** 2012. *The Global Competitiveness Report 2012-2013*
- World Economic Forum.** 2013. *The Global Competitiveness Report 2013-2014*
- World Economic Forum.** 2013. *The Global Competitiveness Report 2014-2015*